

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri (Diskominfo) adalah salah satu bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Fungsi utama Diskominfo Kabupaten Kediri ialah memberikan dukungan kepada Bupati Kediri dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Dalam lingkup masyarakat di Kabupaten Kediri, Diskominfo bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur komunikasi, layanan informasi, dan pengaturan yang mencakup pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi, multimedia, serta penyebaran informasi. Selain itu, Diskominfo juga memiliki peran penting dalam mempromosikan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan sektor publik lainnya. Melalui perannya, Diskominfo berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan layanan publik di tingkat daerah Kabupaten Kediri.

Pada era saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi pemerintah, terutama di Kabupaten Kediri. Data menjadi landasan krusial untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang efektif. Namun, pemerintah Kabupaten Kediri menghadapi berbagai permasalahan terkait data, termasuk masalah validitas, kredibilitas, konsistensi, serta aksesibilitas yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Kediri telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Kediri melalui proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata. Dengan proyek tersebut, pemerintah berupaya untuk memastikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih valid, kredibel, akurat, terkini, dan mudah diakses oleh semua instansi terkait di Kabupaten Kediri.

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasinya. Inisiatif tersebut merupakan mandat Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak tantangan dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. (Maulia Jayantina, 2021)

Sebagai mahasiswa magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, penulis memiliki kesempatan yang berharga untuk turut andil bagian dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan pada pengimplementasian kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kediri. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, penulis ikut terlibat dalam proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata, penulis berperan dalam tugas-tugas penting seperti penginputan data yang akurat, serta melakukan verifikasi data guna memastikan keandalan informasi. Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam memvisualisasikan data yang terintegrasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, dan dalam pembuatan Metadata yang informatif, sehingga data yang tersedia menjadi sumber informasi yang valid dan berguna bagi semua pihak terkait. Melalui peran penulis dalam program magang ini, penulis berharap dapat membantu meningkatkan kualitas data dan mendukung upaya pembenahan dalam manajemen informasi di Kabupaten Kediri.

Pada laporan PKL ini, akan membahas berbagai tugas-tugas dan hal-hal penting dalam proyek yang sudah dijalankan selama masa pelaksanaan kegiatan PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Penulis akan membahas langkah-langkah atau tugas yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, manfaat, serta proses dalam mengimplementasikan Program Satu Data Indonesia (SDI) dengan wujud Portal Website Meta Data, Satu Data, dan Open Data di Pemerintahan Kabupaten Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Pada pelaksanaan kegiatan magang konversi praktek kerja lapangan (PKL) yang telah diikuti dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata dalam mengintegrasikan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana implementasi proyek tersebut memengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja instansi pemerintah daerah / OPD di Kabupaten Kediri ?
3. Apa tantangan dan hambatan utama yang dihadapi dalam menjalankan proyek integrasi data tersebut?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaksanaan magang mandiri MBKM untuk konversi PKL yang diikuti oleh penulis yaitu sebagai media dan sarana penulis sebagai mahasiswa magang untuk dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu-ilmu dan skill yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di universitas. Selain tujuan tersebut, diharapkan penulis juga dapat menerapkan berbagai aspek-aspek penting dalam proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata, termasuk hal-hal berikut:

1. Dapat mewujudkan kebijakan Satu Data, Open Data, dan Metadata yang dibuat oleh pemerintah di Kabupaten Kediri.
2. Membantu dan berturut andil dalam mengintegrasikan data-data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri sehingga dapat memberikan data yang konsisten dan akurat.
3. Memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata.

1.4 Manfaat/Kegunaan

Hasil pemecahan masalah dan temuan keilmuan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan magang untuk konversi praktek kerja lapangan (PKL) ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan kontribusi nyata dalam mewujudkan dan mengimplementasikan proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata di Kabupaten Kediri.
2. Membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan menghasilkan data yang mutakhir dan berkualitas.
3. Memberikan wawasan yang lebih baik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri serta pihak pemerintah setempat mengenai pelaksanaan proyek Satu Data, Open Data, dan Metadata.